



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

BULETIN APBN

Vol. VIII, Edisi 17, September 2023

Ancaman Kelaparan Masih Terjadi, Akankah Pembangunan Ketahanan Pangan Berhasil?

p.3

Revitalisasi Industri Melalui Hilirisasi Tembaga

p.8

Kunjungan Wisatawan Indonesia Pasca Pandemi

p.12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor

Riza Aditya Syafri

Ancaman Kelaparan Masih Terjadi, Akankah Pembangunan Ketahanan Pangan Berhasil?

p.3

Ancaman kelaparan masih terjadi di Indonesia di tengah anggaran ketahanan pangan terus meningkat dan berbagai program ketahanan pangan menjadi sektor prioritas pembangunan. Prevalensi ketidakcukupan pangan serta penduduk yang mengalami kerawanan pangan kembali meningkat serta menjauhi dari target yang ditetapkan pemerintah. Diperlukan persiapan penanganan dan pengelolaan jangka panjang yang menyelesaikan akar permasalahan, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai target mewujudkan masyarakat Indonesia tanpa kelaparan pada tahun 2030. Komisi IV DPR RI perlu mendorong Kementerian Pertanian dan Bapanas untuk meningkatkan kinerja pertanian berkelanjutan, meningkatkan produk dan produktivitas pertanian, serta memastikan anggaran ketahanan pangan menasar langsung kepada masyarakat miskin dalam mengakses pangan serta mencukupi kebutuhan konsumsi energi mereka.

p.8

Revitalisasi Industri Melalui Hilirisasi Tembaga

Pemerintah terus berusaha untuk menghidupkan kembali industri melalui hilirisasi. Rencana tersebut tertuang dalam NK RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024 dan RIPIN 2015-2035. Dengan cadangan tembaga Indonesia yang berada di posisi 7 besar dunia, komoditas tembaga terpilih sebagai salah satu agenda prioritas hilirisasi. Meskipun demikian, hilirisasi menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi atensi Komisi VII DPR RI diantaranya: insentif, regulasi, dampak lingkungan hingga roadmap.

Kunjungan Wisatawan Indonesia Pasca Pandemi

p.12

Sektor pariwisata berkontribusi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pendapatan devisa dan penyediaan lapangan kerja yang diperoleh melalui kunjungan wisatawan. Pandemi Corona Virus (Covid-19) menjadi pukulan bagi pariwisata Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata di antaranya pemberian stimulus pariwisata, insentif untuk sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) serta pengembangan aspek 3A. Namun, masih terdapat tantangan yang harus dijawab pemerintah seperti perubahan tren pariwisata, aksesibilitas, serta kenaikan harga tiket pesawat. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemenparekraf meningkatkan jumlah kunjungan wisnus melalui berbagai insentif. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong Kementerian BUMN untuk mengevaluasi skema harga tiket pesawat, dan menerapkan berbagai inovasi untuk menurunkan beban operasional maskapai.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id

Ancaman Kelaparan Masih Terjadi, Akankah Pembangunan Ketahanan Pangan Berhasil?

Hikmatul Fitri*)
Ade Nurul Aida**)

Abstrak

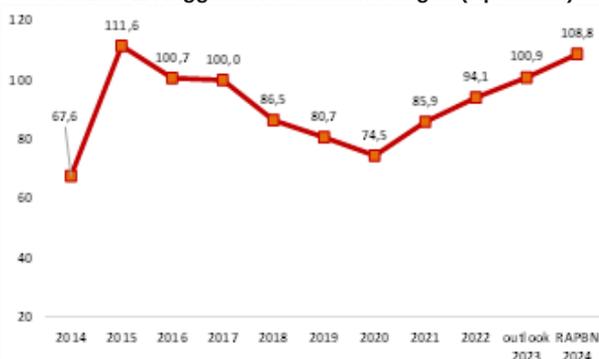
Ancaman kelaparan masih terjadi di Indonesia di tengah anggaran ketahanan pangan terus meningkat dan berbagai program ketahanan pangan menjadi sektor prioritas pembangunan. Prevalensi ketidakcukupan pangan serta penduduk yang mengalami kerawanan pangan kembali meningkat serta menjauhi dari target yang ditetapkan pemerintah. Diperlukan persiapan penanganan dan pengelolaan jangka panjang yang menyelesaikan akar permasalahan, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai target mewujudkan masyarakat Indonesia tanpa kelaparan pada tahun 2030. Komisi IV DPR RI perlu mendorong Kementerian Pertanian dan Bapanas untuk meningkatkan kinerja pertanian berkelanjutan, meningkatkan produk dan produktivitas pertanian, serta memastikan anggaran ketahanan pangan menasar langsung kepada masyarakat miskin dalam mengakses pangan serta mencukupi kebutuhan konsumsi energi mereka.

Bencana kelaparan akibat kekurangan makanan hingga menyebabkan kematian masih terulang kembali di Indonesia. Setidaknya warga terdampak berkisar sepuluh ribu warga hingga akhir Juli 2023. Kemarau kering yang terjadi bersamaan dengan *El Nino* di beberapa wilayah di Papua mengakibatkan tanaman pangan milik warga gagal panen yang menyebabkan masyarakat setempat sulit memperoleh bahan makanan. Enam warga meninggal dunia akibat kekurangan makanan yang dipicu cuaca ekstrem sejak Mei lalu.

Fenomena serupa pernah terjadi sebelumnya di pengunungan Papua pada tahun 1998 dan 2015. Terdapat 11 warga Kabupaten Lanny Jaya, Papua, yang meninggal akibat kelaparan di tahun 2015 (Costa, F.M., 2023). Sederetan kejadian tersebut mengindikasikan bahwa kelaparan masih menjadi ancaman. Sebagian masyarakat masih sangat sulit menjangkau ketersediaan pangan, khususnya masyarakat miskin. Memenuhi bahan pangan dan membebaskan masyarakat dari kelaparan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia.

Berbagai kebijakan program ketahanan pangan yang selaras dengan Tujuan

Gambar 1. Anggaran Ketahanan Pangan (Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan (2022, 2023), diolah (2023).

Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menjadi prioritas pembangunan pemerintah. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan tercermin dalam alokasi anggaran ketahanan pangan dalam APBN yang terus meningkat, setidaknya empat tahun terakhir. Salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs)/TPB 2030 yaitu menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin yang berada dalam kondisi rentan terhadap makanan, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Target tersebut menjadi fokus kebijakan fiskal dalam agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi.

*) Analisis APBN Non-ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

***) Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai salah satu sektor prioritas diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan. Alokasi anggaran ketahanan pangan tahun 2024 sebesar Rp108.764,2 miliar. Mayoritas anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, baik belanja kementerian/lembaga (K/L) maupun program subsidi yang masuk dalam belanja non-K/L. Dana Transfer Ke Daerah (TKD) melalui DAK Fisik Tematik dan DAK non-fisik sebesar Rp300 miliar, dan kontribusi Dana Desa sebesar Rp9.017,9 miliar yang diantaranya melalui program ketahanan pangan hewani, juga dialokasikan pemerintah untuk mendukung program ketahanan pangan (Kementerian Keuangan, 2023).

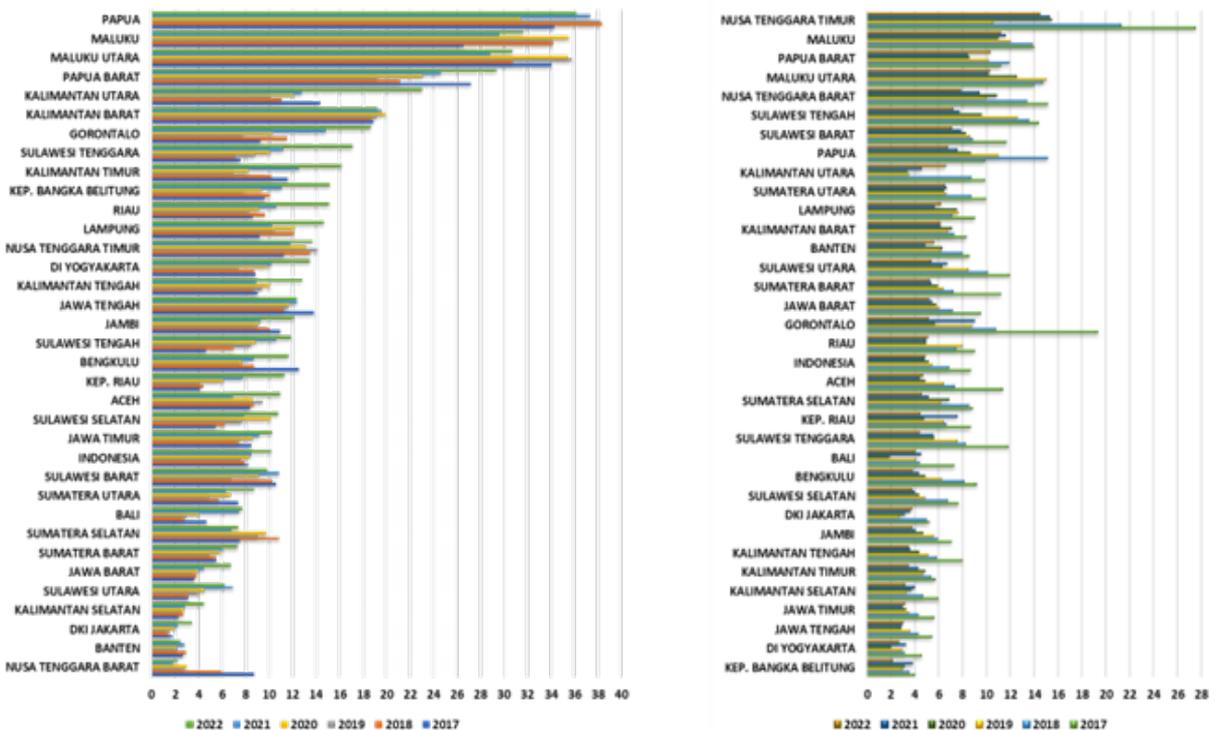
Kelaparan dan Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Kecukupan konsumsi pangan dan semakin baiknya akses ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia

sangat *urgent* untuk diwujudkan. Hal ini didasarkan pada angka kerawanan pangan Indonesia yang terus meningkat. Prevalensi penduduk dengan tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) Indonesia tahun 2022 mencapai dua digit, yakni 10,21 persen. *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi dari suatu penduduk, dimana konsumsi makanan sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Angka PoU sebesar 10,21 persen tersebut berarti terdapat 10 hingga 11 orang dari 100 penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energinya. Angka tersebut meningkat selama tiga tahun berturut akibat terjadi pandemi.

Angka PoU sempat mengalami perbaikan pada tahun 2018, yaitu turun 0,31 poin dari tahun sebelumnya menjadi 7,92. Kemudian mengalami perbaikan lagi pada tahun 2019, turun menjadi 7,63 persen. Namun, kembali meningkat pada tahun 2020-2022, secara berurutan menjadi

Gambar 2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (kiri) dan Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (kanan) per Provinsi Tahun 2017 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023a, 2023b), diolah (2023).

8,34 persen, 8,49 persen, dan 10,21 persen. Bila ditelisik lebih dalam, Papua dan beberapa provinsi di timur Indonesia merupakan wilayah yang mengalami tingkat prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan yang cukup tinggi, bahkan terjadi jauh sebelum pandemi. Ketidacukupan konsumsi pangan Provinsi Papua, Maluku dan Maluku Utara berada pada level cukup memprihatinkan, secara berurutan mencapai 36,18 persen, 31,68 persen, dan 30,71 persen pada tahun 2022.

Prevalensi Kerawanan Pangan Masih Tinggi Terutama Pada Penduduk Miskin

Mewujudkan Indonesia tanpa kelaparan tahun 2030, indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur target tersebut dalam SDGs ialah prevalensi penduduk dengan tingkat kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan. Indikator ini mengukur persentase individu pada suatu populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini meliputi ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, terpaksa untuk mengurangi porsi makan atau mengurangi frekuensi makan, hingga kondisi merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali (Bappenas, 2020).

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Bappenas tentang pelaksanaan SDGs tahun 2022 menyebutkan kinerja indikator prevalensi penduduk dengan tingkat kerawanan pangan berdasarkan pengalaman mengalami tren positif secara nasional, yakni menurun selama lima tahun yaitu: 8,66 persen (2017), 6,86 persen (2018), 5,42 persen (2019), 5,12 persen (2020), dan 4,79 persen (2021). Namun indikator tersebut kembali

meningkat menjadi 4,85 persen pada tahun 2022, di atas target yang diterapkan sebesar 4,5 persen.

Apabila dilihat lebih jauh, masih terdapat 18 provinsi yang mengalami tingkat kerawanan pangan di atas persentase nasional (Gambar 2 kanan). Provinsi yang memiliki prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat pada tahun 2022 adalah NTT (14,48 persen), Maluku (11,18 persen), Papua Barat (10,31 persen) dan Maluku Utara (10,31 persen). Jawa Barat dan Banten yang merupakan provinsi terdekat dengan ibukota negara juga menghadapi kerawanan pangan di atas angka nasional, yaitu 5,18 persen dan 5,61 persen. Hanya 14 provinsi yang mencapai target prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan di bawah 4,5 persen.

Menurunnya angka prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan pada suatu provinsi tidak semata-mata menjadikan daerah tersebut mengalami perbaikan dalam hal kecukupan pangan. Suatu wilayah yang memiliki perbaikan kerawanan pangan sedang atau berat dalam populasi tertentu, tidak berarti bahwa populasi tersebut memiliki tingkat kecukupan konsumsi pangan yang lebih baik. Sebagai contoh, Provinsi Papua mengalami penurunan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat menjadi 7,58 persen pada tahun 2021. Namun di sisi lain, Papua juga merupakan wilayah dengan prevalensi ketidacukupan pangan yang melonjak tajam yaitu sebesar 37,37 persen, meningkat 5,88 poin dari tahun sebelumnya. Begitupula hal yang dialami oleh Provinsi NTT, Maluku, dan beberapa provinsi lainnya.

Prevalensi penduduk dengan tingkat kerawanan pangan di perdesaan juga lebih tinggi dibandingkan perkotaan, khususnya terjadi pada kelompok rumah tangga miskin. Sebanyak 8,66 persen dari kelompok 20 persen penduduk termiskin (kuintil 1) dan 6,01 persen dari kelompok 20 persen penduduk miskin dan rentan (kuintil 2) masih menghadapi tingkat

kerawanan pangan sedang atau berat pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023a).

Secara global, Indonesia menempati ranking 77 dari 121 negara dalam *Global Hunger Index*. Meskipun skor yang dicapai Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan selama periode 2007-2022 (skor 2007: 2,91 status kelaparan: serius; skor 2022: 17,9 status kelaparan: moderat), Indonesia masih berada pada level kelaparan moderat. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang memiliki indeks kelaparan yang tinggi, berada pada urutan ketiga setelah Timor Leste (30,6) dan Laos (19,2).

Diperlukan Solusi Adaptif dan Bersifat Jangka Panjang

Data dan fakta yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat dijadikan ukuran bahwa program ketahanan pangan guna mewujudkan masyarakat tanpa kelaparan, belum benar-benar menyentuh akar permasalahan. Hal tersebut berakibat kelaparan dengan sebab yang sama masih terulang. Memitigasi penyebab timbulnya kelaparan dengan jangka pendek tidaklah cukup. Antisipasi dan penanganan adaptif bagi perubahan lingkungan seperti perubahan iklim, serta pengelolaan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Hal lain yang perlu menjadi atensi pemerintah ialah ancaman malnutrisi yang akan memengaruhi pertumbuhan generasi bangsa, yaitu kelaparan terselubung (*hidden hunger*) yang banyak dialami oleh negara berkembang dan negara maju, termasuk Indonesia (Wahyudi, M.Z., 2020). Kelaparan terselubung terjadi akibat kekurangan zat gizi mikro (Vitamin A, asam folat, *zinc*, dan yodium), dapat terjadi pada bayi, anak, remaja, orang dewasa, ibu hamil, dan lansia.

Kelaparan terselubung yang terjadi pada anak merupakan penyebab stunting, menjadikan manusia mengalami kerentanan terhadap penyakit, kognitif yang rendah, kualitas fisik pekerja rendah, reproduksi buruk, hingga

menurunkan produktivitas yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Guru Besar Ekologi IPB, Drajat Martianto, menjelaskan secara nasional Indonesia dapat mengalami kerugian lebih dari Rp50 triliun dari rendahnya produktivitas kerja akibat Anemia Gizi Besi (Ihsan, Dian, 2022).

Ketersediaan infrastruktur untuk menunjang akses pangan perlu dilakukan komprehensif dan *impactful* secara permanen. Komisi IV DPR RI perlu mendorong Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk meningkatkan kinerja pertanian berkelanjutan, meningkatkan produk dan produktivitas pertanian, serta memastikan anggaran ketahanan pangan yang dialokasikan menyasar langsung kepada masyarakat miskin dalam mengakses pangan serta mencukupi kebutuhan konsumsi energi mereka.

Komisi XI DPR RI juga perlu mendorong pemerintah dalam hal ini Bappenas untuk mengevaluasi dan memetakan kembali sejumlah permasalahan mendasar yang sesuai kebutuhan dan karakter masing-masing regional/wilayah dalam mewujudkan Indonesia tanpa ancaman kelaparan. Berdasarkan hasil tersebut, instrumen kebijakan dapat diintegrasikan ke dalam pelaksanaan program dengan efektif, seperti upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat pada wilayah termiskin dalam memenuhi gizi standar dan akses memperoleh bahan pangan hewani lebih baik.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2023a). Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat Berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. Diunduh melalui https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/data/1474/sdgs_2/1, pada 20 Agustus 2023.

Badan Pusat Statistik. (2023b). Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (persen). Diunduh melalui https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/, pada 23 Agustus 2023.

- Badan Pusat Statistik. (2020). Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2022). Pelaksanaan Pencapaian TPB/SGs Tahun 2022. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs. Edisi II. Jakarta: Bappenas.
- Costa, F.M. (2023). Kasus Kelaparan di Papua Berulang. Diakses melalui https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/01/kasus-kelaparan-di-papua-berulang-penanganan-dinilai-belum-sentuh-akar-masalah?open_from=Search_Result_Page, pada 20 Agustus 2023.
- Ihsan, Dian. (2022). Guru Besar IPB: 50 Persen Rakyat Indonesia Alami Kelaparan Tersembunyi. Diakses melalui <https://www.kompas.com/edu/read/2022/09/18/094509771/guru-besar-ipb-50-persen-rakyat-indonesia-alami-kelaparan-tersembunyi?page=all>, pada 20 Agustus 2023.
- International Food Policy Research Institute. (2023). *Global Hunger Index 2022*. Washington DC: International Food Policy Research Institute.
- Kementerian Keuangan. (2023). Nota Keuangan beserta RAPBN 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2022). Nota Keuangan beserta APBN 2015 - 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Wahyudi, M.Z. (2020). Gizi Penghela Pertumbuhan Anak. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/02/25/gizi-penghela-pertumbuhan-anak>, pada 20 Agustus 2023.

Revitalisasi Industri Melalui Hilirisasi Tembaga

Deandra Chasmir*)
Leo Iskandar**)

Abstrak

Pemerintah terus berusaha untuk menghidupkan kembali industri melalui hilirisasi. Rencana tersebut tertuang dalam NK RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024 dan RIPIN 2015-2035. Dengan cadangan tembaga Indonesia yang berada di posisi 7 besar dunia, komoditas tembaga terpilih sebagai salah satu agenda prioritas hilirisasi. Meskipun demikian, hilirisasi menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi atensi Komisi VII DPR RI diantaranya: insentif, regulasi, dampak lingkungan hingga roadmap.

Salah satu agenda prioritas dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK RAPBN) tahun 2024 adalah revitalisasi industri melalui penguatan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) guna mendorong produktivitas bernilai tambah tinggi, berdaya saing, dan berorientasi ekspor. Revitalisasi tersebut berangkat dari industri sektor hulu yang memiliki dampak positif terhadap beberapa aspek, seperti peningkatan penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara, serta program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan revitalisasi industri TA 2024 akan tetap mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tembaga merupakan salah satu komoditas yang menjadi prioritas revitalisasi industri hulu dalam RIPIN. Indonesia memiliki cadangan bijih tembaga terbesar ketujuh dunia, yang diperkirakan mencapai 3 miliar ton dan cadangan sumber daya mencapai 16 miliar.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2020, dengan tingkat produksi saat ini, masa eksploitasi tembaga diperkirakan sekitar 23 tahun. Hal ini menunjukkan tembaga Indonesia memiliki potensi strategis untuk terus diakselerasi dalam

rangka meningkatkan daya saing bangsa (Kementerian ESDM, 2020).

Apabila pabrik peleburan dan pemurnian tembaga (*smelter*) beroperasi secara penuh, akan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek *smelter* akan menyerap hingga 40 ribu orang secara keseluruhan selama masa konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi tembaga, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui pendapatan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja. Selain memberikan lapangan pekerjaan, perusahaan pemegang izin tambang telah membantu masyarakat di sekitar lokasi penambangan melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada masyarakat sekitar area penambangan.

Ditjen Minerba menunjukkan bahwa, terdapat sejumlah 18 izin yang saat ini berstatus aktif, yang terdiri dari 1 izin dengan kategori Izin Usaha Penambangan/Kontrak Karya Eksplorasi (IUP/KK Eksplorasi) dan 17 izin Izin Usaha Penambangan/Kontrak Karya Operasi Produksi (IUP/KK OP). Keseluruhan izin tersebut mencakup area seluas sekitar 57,31 ribu hektar. Izin eksplorasi berlokasi di Jawa Tengah, sementara izin operasi produksi tersebar di berbagai wilayah provinsi seperti Jawa Timur, Sulawesi

*) Analisis APBN Non-ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

**) Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, serta beberapa provinsi lainnya.

Indonesia memiliki dua pabrik ekstraksi tembaga yang telah beroperasi saat ini, yaitu PT Smelting Gresik dan PT Batutua Tembaga Raya. Kegiatan ekstraksi tembaga pada dua pabrik tersebut dilakukan dengan memproses konsentrat tembaga yang disuplai oleh tiga perusahaan berizin IUP KK dan OP. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Freeport Indonesia (PT FI), PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT), dan PT Batutua Kharisma Permai. Pabrik-pabrik ekstraksi tembaga memiliki peran krusial dalam menjalankan proses pengolahan konsentrat tembaga yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan tersebut (Kementerian ESDM, 2021).

Kemajuan hilirisasi industri tembaga di Indonesia saat ini masih terasa lambat dikarenakan keterbatasan industri pemanfaatan tembaga di dalam negeri. Produksi konsentrat tembaga pada tahun 2020 mencapai 2,2 juta ton, dimana sekitar 1 juta ton dijual di pasar domestik dan 1,2 juta ton diekspor ke luar negeri. Sementara produksi katoda tembaga sejumlah 268 ribu ton, di mana sebanyak 198 ribu ton diekspor ke luar negeri dan 71 ribu ton digunakan dalam negeri. Penyerapan konsentrat dan katoda tembaga di dalam negeri pada 2020 tersebut mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap produksi industri hilir di Indonesia.

Tantangan dan Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Revitalisasi Industri Melalui Hilirisasi Tembaga

Hilirisasi industri tembaga di Indonesia saat ini dilakukan guna mendorong agar tembaga yang dihasilkan bernilai tambah tinggi, berorientasi ekspor dan berdaya saing. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan internal yang harus diatasi agar pelaksanaannya dapat berjalan efisien. Untuk itu, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi atensi Komisi VII DPR RI, diantaranya **Pertama**, keterbatasan dukungan insentif terkait harga gas industri menjadi keluhan

yang sering disampaikan oleh para pelaku usaha. Industri tembaga masih belum mendapatkan insentif penurunan harga gas industri sebesar 6 dolar AS per MMBTU. Insentif penurunan harga gas tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan utilisasi produksi, pertumbuhan ekspor, dan daya tarik investasi (Bank Indonesia, 2022). Insentif tersebut belum dapat diberikan karena industri tembaga belum termasuk dalam sektor industri yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif harga gas industri sebesar 6 dolar AS per MMBTU.

Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memasukkan industri tembaga dalam daftar penerima insentif harga gas industri. Kebijakan tersebut dibutuhkan untuk menekan biaya penggunaan energi yang merupakan salah satu komponen terbesar industri tembaga. Kebijakan tersebut juga dibutuhkan untuk mendorong peningkatan produktivitas industri tembaga.

Kedua, keterbatasan *smelter* tembaga yang disebabkan oleh regulasi, biaya modal yang tinggi, dan kurangnya keragaman industri hilir yang ada. Industri hilir yang masih dalam tahap pengembangan (*forming*) pada tahun 2022 baru industri pembuatan batang dan kawat tembaga. Keterbatasan dalam industri tahap pengembangan ini menyebabkan nilai tambah dalam hilirisasi komoditas tembaga tetap terbatas. (Bank Indonesia, 2022).

Langkah-langkah strategis untuk memperkuat industri hilir perlu di dorong untuk menarik minat investor dalam pembangunan *smelter*. Selain pemberian insentif harga gas, pemerintah perlu menyegerakan implementasi pemangkasan pengurusan perizinan (Hak Guna Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) sebagaimana amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja melalui *Online Single Submission*.

Ketiga, perlu upaya pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas eksploitasi komoditas. Pembangunan

smelter sudah pasti akan menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti gas SO₂ yang dihasilkan dari proses penambangan dan proses pengolahan konsentrat, serta peningkatan unsur beracun dan distribusi spasialnya pada tanah di sekitar lokasi *smelter*. Berbagai polutan yang dihasilkan *smelter* dapat tersebar di udara (dalam bentuk gas atau *aerosol*) dan kemudian mengendap di lapisan permukaan tanah dan secara bertahap menembus ke dalam tanah (Mazurek dkk., 2017). Kondisi ini akan berdampak terhadap pencemaran udara yang secara tidak langsung akan memengaruhi kesehatan warga yang berada disekitar lokasi *smelter*.

Risiko lingkungan akibat aktivitas *smelter* tersebut menuntut pemerintah untuk memiliki pendekatan secara holistik dalam menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari limbah *smelter*. Pendekatan tersebut sekurang-kurangnya meliputi pengukuran atau studi terkait pergerakan polutan dari tumpukan tempat penyimpanan limbah, dampaknya terhadap kontaminasi tanah, air dan lingkungan, serta pengaruhnya terhadap vegetasi, mikroflora tanah, parameter kimia dan biologi tanah. Peraturan yang ketat dan efektif juga diperlukan guna memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tambang dan fasilitas pemurnian tembaga mengimplementasikan kontrol yang cermat dan menyampaikan laporan secara teratur terkait emisi gas beracun. Kedua hal tersebut dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Keempat, belum adanya pemetaan dan *roadmap* investasi yang memadai terkait industri hulu, antara, dan hilir dari hasil pengelolaan data yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian.

Proses inventarisasi hilirisasi memerlukan langkah pengidentifikasian dan pemetaan perusahaan yang beroperasi di sektor industri tembaga, baik yang

berada di bawah pengawasan KESDM maupun Kementerian Perindustrian. Setelah proses pengidentifikasian dan pemetaan, pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan perusahaan tambang yang bermaksud membangun pabrik pengolahan tembaga hingga tahap lanjut (hilirisasi) sebagai produsen, dan berbagai perusahaan dalam industri elektronik yang bertindak sebagai pengguna akhir. Koordinasi tersebut dibutuhkan agar terjalin kerja sama antara produsen dan pengguna, sehingga produk yang dihasilkan dari proses hilirisasi tembaga dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperbaiki integrasi rantai pasok industri tembaga mulai dari tahap hulu hingga hilir, serta meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2022) Penguatan Struktur Ekonomi Indonesia: Tinjauan *Local Value Chain*, Hilirisasi, dan Industri Hijau. Jakarta: Bank Indonesia.
- Kementerian ESDM. (2021). *Grand Strategy Mineral Dan Batubara Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian ESDM. (2020). *Booklet Tambang Tembaga*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Perindustrian. (2015). *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Mazurek, R., Kowalska, J., Gasiorek, M., Zadrozny, P., Jozefowska, A., Zaleski, T., Kepka, W., Tymczuk, M., and Orłowska, K. (2017). *Assessment of heavy metals contamination in surface layers of Roztocze National Park forest soils (SE Poland) by indices of pollution*. Chemosphere, 168: 839–850 (11 pages). <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.10.126>

Setiawan, V.N. (2023). RI Punya Pabrik Tembaga Terbesar Dunia, Ini Jumlah Pekerjanya. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230301174605-4-418074/ri-punya-pabrik-tembaga-terbesar-dunia-ini-jumlah-pekerjanya>, pada 27 Agustus 2023.

Kunjungan Wisatawan Indonesia Pasca Pandemi

Ollani Vabiola Bangun*)
Savitri Wulandari**)

Abstrak

Sektor pariwisata berkontribusi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pendapatan devisa dan penyediaan lapangan kerja yang diperoleh melalui kunjungan wisatawan. Pandemi Corona Virus (Covid-19) menjadi pukulan bagi pariwisata Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata di antaranya pemberian stimulus pariwisata, insentif untuk sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE)* serta pengembangan aspek 3A. Namun, masih terdapat tantangan yang harus dijawab pemerintah seperti perubahan tren pariwisata, aksesibilitas, serta kenaikan harga tiket pesawat. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemenparekraf meningkatkan jumlah kunjungan wisnus melalui berbagai insentif. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong Kementerian BUMN untuk mengevaluasi skema harga tiket pesawat, dan menerapkan berbagai inovasi untuk menurunkan beban operasional maskapai.

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar. Sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 5,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyumbang nilai devisa sebesar Rp280 triliun, serta menyerap tenaga kerja pariwisata sebesar 13 juta orang dan tenaga kerja ekonomi kreatif sebesar 19,01 juta orang (Kemenkeu, 2023a). Pandemi Corona Virus (Covid-19) pada awal tahun 2020 menyebabkan kontraksi pada sektor pariwisata. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kekhawatiran masyarakat untuk bepergian menjadi faktor penyebab terpuruknya sektor pariwisata Indonesia.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) pada tahun 2020 menurun sebesar 74,84 persen dibanding tahun 2019, dari 16,11 juta kunjungan menjadi 4,05 juta kunjungan. Sementara jumlah kunjungan wisatawan Nusantara (Wisnus) menurun sebesar 30 persen (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020). Penurunan kunjungan wisatawan tersebut berdampak pada penurunan devisa yang mencapai 90 persen atau sebesar USD3,4 miliar, kontraksi pada tenaga kerja pariwisata sebesar 14,67 juta tenaga kerja, tingkat okupansi berbayar di kawasan

pariwisata hanya mencapai 12,67 persen, dan hilangnya pekerjaan pada sektor pariwisata bagi 409 ribu orang (Kementerian Luar Negeri, 2021).

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk memulihkan sektor pariwisata, diantaranya melalui pemberian stimulus pariwisata sebesar Rp3,8 triliun yang terdiri dari hibah pariwisata untuk pajak dan hotel sebesar Rp3,3 miliar, insentif untuk sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE)* sebesar Rp70 miliar, dan insentif penerbangan melalui Kementerian Perhubungan sebesar Rp430 miliar (BPS, 2021). Pemerintah juga melakukan program vaksinasi secara masif, sertifikasi program CHSE pada pelaku sektor pariwisata, promosi pariwisata dengan membuat berbagai *event*, pengembangan aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A), serta pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) yang ditandai dengan dilonggarkannya kebijakan PSBB.

Momentum pemulihan pariwisata Indonesia terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisata sebesar 91,19 persen pada Mei tahun 2022 dan pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 6,56 persen.

*) Analis APBN Non-ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

**) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Indonesia

Wisatawan pariwisata Indonesia terdiri dari wisman dan wisnus. Wisman terbanyak yang berkunjung ke Indonesia berasal dari negara Malaysia dan Singapura, diikuti oleh Tiongkok, Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Korea Selatan, Jerman, Belanda, dan Taiwan.

Jumlah kunjungan wisman sebelum pandemi menunjukkan tren yang positif, dengan jumlah kunjungan per bulan berada pada rentang 1,2 - 1,6 juta kunjungan (BPS, 2022). Jumlah kunjungan wisman pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan akibat pandemi covid-19, dari 16,1 juta kunjungan pada tahun 2019 menjadi 4 juta pada tahun 2020. Penurunan kunjungan wisman terus berlanjut hingga tahun 2021, yakni menjadi 1,5 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisman meningkat menjadi 5,8 juta kunjungan di tahun 2022 ketika pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.

Gambar 1. Jumlah Kunjungan Wisman, Rata-Rata Pertumbuhan Pengeluaran Wisman dan Rata-Rata Pengeluaran Wisman 2018 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik 2018 - 2023, diolah (2023).

Meskipun terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisman, peningkatan tersebut tidak serta merta meningkatkan jumlah rata-rata pengeluaran wisman. Peningkatan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2019 tidak serta merta meningkatkan rata-rata pengeluaran wisman. Rata-rata pengeluaran wisman pada tahun 2019 malah mengalami penurunan sebesar 6,10 persen (gambar 1).

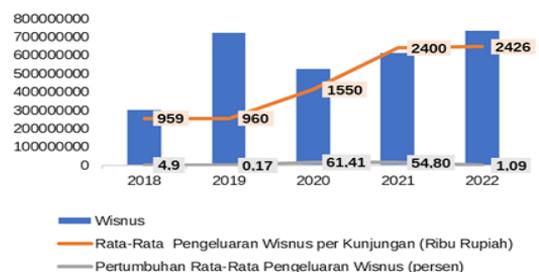
Rata-rata pengeluaran wisman pada tahun 2020 bertumbuh 88,98 persen

dan kembali bertumbuh 43,05 persen di tahun 2021, disaat kunjungan wisman mengalami penurunan akibat pandemi covid-19. Kondisi sebaliknya terjadi di tahun 2022, rata-rata pengeluaran wisman menurun 53,25 persen di saat terjadi peningkatan kunjungan wisman dan transisi *new normal*.

BPS (2023) mencatat bahwa rata-rata lama tinggal wisman kembali meningkat menjadi 9,88 hari pada tahun 2022. Namun peningkatan tersebut belum mampu mendorong pengeluaran wisman. Pemerintah dan pelaku sektor pariwisata dituntut untuk mampu berinovasi dan mampu menyediakan paket liburan untuk jangka waktu atau tema tertentu sehingga dapat mendorong pengeluaran wisman.

Jumlah kunjungan wisnus terlihat menunjukkan tren yang positif, kecuali pada tahun 2020 pada awal terjadinya pandemi covid-19 akibat adanya kebijakan pembatasan sosial. Jumlah kunjungan wisnus terus bertumbuh dari 524,5 juta kunjungan di tahun 2020 menjadi 734,8 juta di tahun 2022. Jumlah kunjungan wisnus di tahun 2022 tersebut lebih tinggi 1,76 persen dibandingkan kunjungan sebelum terjadinya pandemi. Rata-rata pengeluaran wisnus hanya meningkat sebesar 1,09 persen di tahun 2022, padahal di tahun 2021 rata-rata pengeluaran wisnus meningkat sebesar 54,80 persen.

Gambar 2. Jumlah Kunjungan Wisnus, Rata-Rata Pertumbuhan Pengeluaran Wisnus dan Pertumbuhan Rata-Rata Pengeluaran Wisnus 2018 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik 2018 - 2023, diolah (2023).

Tantangan Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan

Salah satu target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah meningkatkan devisa sektor pariwisata menjadi USD30 miliar, serta meningkatkan jumlah perjalanan wisnus sebesar 350-400 juta perjalanan dan wisman sebesar 22,3 juta kedatangan. Terdapat beberapa tantangan dalam meningkatkan jumlah wisatawan. **Pertama**, perubahan tren pariwisata dan aksesibilitas. Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam berwisata. Kemenparekraf menyebutkan bahwa tren pariwisata saat ini mengarah pada *normalize, customize, localized* dan *smaller in size*. Tren berwisata ini mengedepankan kualitas pariwisata dan pariwisata yang berkelanjutan dari pada *mass tourism*. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui kemenparekraf dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengembangkan desa wisata.

Desa wisata diharapkan dapat memberikan pengalaman baru melalui keunikan dan kearifan lokal yang ditawarkan. Aksesibilitas desa wisata menjadi permasalahan dalam pengembangannya. Berdasarkan *Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)/Trade Tourism Development Index (TTDI)* tahun 2021, aspek *Tourist Service infrastructure* memperoleh poin terendah. Kementerian terkait yaitu Kemenparekraf dan Kemendes PDTT dapat mengoptimalkan pembangunan desa wisata melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) yang terstandarisasi dan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) meningkatkan aksesibilitas infrastruktur untuk kemudahan mencapai destinasi sehingga dapat menarik minat wisatawan baik mancanegara dan nusantara dalam meningkatkan jumlah kunjungan

Kedua, naiknya harga tiket pesawat. Meningkatnya harga minyak dunia akibat perang antara Ukraina dan Rusia menyebabkan peningkatan biaya bahan bakar yang secara langsung berpengaruh pada kenaikan harga pesawat. Komisi VI DPR RI dapat mendorong Kementerian

BUMN untuk dapat mengevaluasi skema harga tiket pesawat dan melakukan inovasi pemasaran sehingga dapat menekan beban operasional tanpa menaikkan harga tiket pesawat.

Ketiga, kondisi konektivitas. Bandara internasional yang kembali dioperasikan hingga saat ini baru hanya 15 bandara, dari 28 bandara internasional yang sebelumnya beroperasi di tahun 2019 (Kemenkeu, 2023b). Komisi V DPR RI dapat mendorong Kementerian Perhubungan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi khususnya udara. Selain itu, Komisi X DPR RI dapat mendorong Kemenparekraf untuk meningkatkan jumlah wisnus yang dominan menggunakan angkutan darat sehingga pariwisata tidak hanya tergantung pada kunjungan wisman, mengingat wisnus menjadi salah satu penopang pariwisata disaat Covid-19.

Belajar dari Pemulihan Pariwisata Negara Thailand

Thailand merupakan salah satu negara ASEAN yang perekonomiannya bergantung pada sektor pariwisata. Pariwisata Thailand mampu menciptakan lapangan kerja sebesar 36 juta lapangan kerja (Mckinsey&Company, 2021). Thailand menduduki peringkat kedelapan secara global pada jumlah kedatangan wisman, dimana Tiongkok menjadi target pasar tertinggi pada tahun 2019 dengan pengeluaran wisman pada sektor akomodasi, *shopping* serta makanan dan minuman. Rata-rata pengeluaran wisman di Thailand lebih besar jumlahnya dibandingkan rata-rata pengeluaran wisnus. Meskipun jumlah wisman pada tahun 2019 sebesar 33 persen dari total jumlah kunjungan, pengeluarannya mampu mencapai 62 persen dari jumlah total pengeluaran wisatawan. Rata-rata pengeluaran wisman sebesar USD1.543 per wisatawan. Sedangkan wisnus hanya sebesar USD152 per wisatawan. Pengeluaran wisman di Thailand lebih besar dari rata-rata pengeluaran wisman di Indonesia yang hanya mencapai USD1.146 pada periode yang sama.

Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah penerbangan internasional, penerbangan domestik serta tingkat okupansi hotel di Thailand. Salah satu upaya yang dilakukan Thailand untuk menopang sektor pariwisata adalah menstimulasi wisata domestik dengan mengeluarkan program Rao Tiew Duay Gun (*We Travel Together*) dengan anggaran sebesar USD640 miliar. Program ini memberikan subsidi sebesar 40 persen dari tarif kamar normal (dibatasi 3.000Bath/USD100 per malam hingga lima malam), subsidi makanan dan minuman (dibatasi hingga 600Bath/USD20 per kamar per malam), dan pengembalian dana sebesar 40 persen dari harga tiket bagi wisatawan domestik yang menggunakan jalur udara.

Upaya menopang pariwisata tidak hanya dilakukan melalui program yang menysasar wisatawan domestik saja, pemerintah Thailand juga memiliki program yang menysasar wisman. Pendekatan *sandbox* dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam rangka memulihkan jumlah kunjungan wisman, terutama di Phuket. Program ini mampu menarik wisman sebesar 26.400 orang dengan total pengeluaran hingga USD4,8 miliar selama wisman menetap pada destinasi tersebut.

Upaya yang dilakukan Thailand dalam memulihkan sektor pariwisata dapat dianggap cukup berhasil. Kunjungan Wisman ke Thailand pada tahun 2022 mencapai 11,5 juta turis dengan pendapatan sekitar USD16 miliar atau sekitar Rp249,47 triliun, sementara Indonesia hanya menerima kunjungan wisman sebesar 5,8 juta wisman pada periode yang sama (CNN Indonesia, 2023). Indonesia dapat belajar dari Thailand khususnya dalam peningkatan jumlah wisatawan dan rata-rata pengeluaran wisatawan, mengingat peningkatan jumlah wisman di Indonesia tidak diikuti dengan peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan.

Daftar Pustaka

BPS. (2023). Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Menurut Negara Tempat Tinggal (Hari), 2020-2022. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/>, pada 27 Agustus 2023.

BPS. (2022). Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2021 dan Tahun 2022. Jakarta: BPS.

CNNIndonesia. (2023). Pariwisata Indonesia Kalah dari Thailand dalam Hal Akses dan Amenitas. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/>, pada 27 Agustus 2023.

Kemenkeu. (2023a). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kemenkeu. (2023b). Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi. Diakses melalui <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/>, pada 27 Agustus 2023.

Kementerian Luar Negeri. (2021). Pariwisata Indonesia Pasca Pandemi, Pemulihan Pasar, dan Kerja Sama dengan Kawasan Amerika: Perlunya Konsolidasi Nasional. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020. Diakses melalui <https://www.kememparekraf.go.id/>, pada 27 Agustus 2023.

Mckinsey & Company. (2021). *Reimagining travel: Thailand tourism after the Covid-19 Pandemic*. Diakses melalui <https://www.mckinsey.com/>, pada 27 Agustus 2023.

World Economic Forum. (2022). *The Travel & Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future*. Switzerland: World Economic Forum.



**Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**

www.pa3kn.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

